

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah penelitian

Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia bukan sebagai pemberian dari penjajah, akan tetapi sebagai hasil dari perjuangan panjang yang telah dilalui dalam kurun waktu yang cukup lama. Keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan disuarakan oleh semua elemen masyarakat Indonesia dari individu – kelompok yang memiliki jiwa dan semangat untuk terwujudnya sebuah negara Indonesia, semangat tersebut merupakan suatu keniscayaan yang melekat dalam setiap jiwa yang rindu akan kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi sebuah puncak catatan sejarah dalam memperoleh kemerdekaan. Namun, setelah proklamasi disuarakan bangsa Indonesia bukan menjadi akhir dari perjuangan itu, akan tetapi awal perjuangan baru dalam membangun sebuah tatanan berbangsa dan bernegara. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka, dan ingin membuktikan bahwa proklamasi yang telah diperoleh merupakan cita-cita yang akan dibuktikan dengan realita.

Dari romantika perjuangan kemerdekaan Indonesia yang heroik telah banyak menampilkan tokoh-tokoh yang berdiri di garis terdepan dalam upaya menentukan identitas sebagai sebuah bangsa. Tampilannya tokoh-tokoh dalam memperjuangkan terbentuknya negara Indonesia adalah sesuatu tema yang menarik untuk ditelusuri, tidak dapat dipungkiri peran para tokoh bangsa sangat mempengaruhi jalannya “sejarah” negeri ini. Salah satu tokoh tersebut adalah Amir Syarifuddin, ia bisa dikategorikan sebagai tokoh pendiri bangsa, yang sejatinya mempunyai peranan penting terhadap republik ini, tetapi keberadaannya hampir dilupakan. Padahal peranannya sudah dilakukan sejak masa sebelum kemerdekaan yaitu masa pergerakan nasional, kemudian peranan Amir terus berlanjut hingga Indonesia mencapai kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan pun peranan Amir terhadap negeri ini masih dilakukan. Peranan Amir yang sangat penting terjadi ketika di awal kemerdekaan, dimana peranannya membangun dan

menjalankan sebuah negara dengan bergabung dalam kabinet pemerintahan Indonesia yang baru berdiri pada saat itu.

Amir Syarifuddin bisa disejajarkan bersama tokoh bangsa lain seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir. Namun ketiga tokoh itu telah mendapat pengakuan dan gelar sebagai pahlawan, sementara Amir Syarifuddin justru diabaikan dan dibuang dari kebenaran sejarah negeri ini. Sebabnya – karena pilihan jalan perjuangan dan politiknya ketika tahun 1948, Amir bergabung bersama FDR menjadi oposisi terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu, kemudian terseretnya Amir pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948 bersama kawan-kawannya seperti Muso di Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai penggerakannya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan jejak-jejak perjuangan serta peranan yang pernah dilakukan Amir sebelum terjadi peristiwa pemberontakan menjadi dilupakan oleh “sejarah” bangsanya sendiri.

Amir Syarifuddin dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1907 di Medan Tapanuli Selatan, Amir memiliki percampuran antara Kristen dan juga Islam dari pasangan Baginda Soripada Harahap dengan Basoenoe Boru Siregar. Amir Syarifuddin merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara yang berasal dari keluarga terkemuka (Anderson, 2018, hlm. 449-450). Masa kecil Amir dihabiskan di *Europese Lagere School* (ELS), sekolah dasar berbahasa Belanda di Medan – didirikan pemerintah Hindia – Belanda khusus untuk orang Eropa, keturunan Timur, dan elit atau golongan priyayi dari bumiputera (Makmur, 1993, hlm. 76). Setelah selesai menempuh pendidikan dasar pada 1921 di usia 14 tahun, Amir dikirim ke Belanda oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikan SLTA (Klinken, 2010, hlm. 170). Kemudian tahun 1921, Amir Syarifuddin memilih melanjutkan pendidikannya di sebuah *Gymnasium* Negeri di Harleem karena sangat tertarik dengan bahasa kuno. Setahun setelah dari *Gymnasium* Harleem, ia pindah ke *Gymnasium* Leiden dan tahun 1927 Amir Syarifuddin dapat menyelesaikan pelajarannya pada *Gymnasium* negeri di Leiden (Wellem, 2009, hlm. 35).

Kemudian ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan sekolah hukum di *Rechtshoogeschool* (RHS), gelar sarjana hukum diperolehnya pada 1933 dari RHS (cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Jakarta (Anderson, 2018, hlm. 450). Pada masa di RHS inilah perhatian Amir Syarifudin mulai dicurahkan

sepenuhnya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Amir Syarifuddin dengan kawan-kawannya di *Indonesis-Clubgebouw* (IC) yaitu kumpulan anak-anak asrama di Keramat 106 yang disebutkan oleh Abu Hanifah sebagai salah satu kelompok angkatan 28. Dalam asrama tersebut sering diadakan diskusi-diskusi yang menyangkut soal politik, kultur, masyarakat, kolonialisme Belanda dan terutama kekaguman mereka terhadap Marx dan Engel (Hanifah dalam Abdullah, 1981, hlm. 92). Hal tersebut menjadikan Amir aktif dalam berbagai organisasi, mulai dari organisasi kedaerahan hingga organisasi pemuda yang bersifat nasional, seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), komite *Jong Sumateranen Bond*, dan *Jong batak*, yang kemudian Amir mewakili dari organisasi tersebut dalam peristiwa yang terjadi pada 28 Oktober 1928, yaitu diadakannya Kongres Pemuda II, Amir Syarifuddin sendiri menjadi bendahara yang mewakili *Jong Batak* (Safwan, 1973, hlm. 32).

Kemudian peranan Amir terhadap bangsa ini terus berkembang dengan mendirikan dan bergabung dengan partai politik. Dalam partai politik Amir Syarifuddin tergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) yang merupakan partai politik pertamanya. Bagi Amir Syarifuddin Partindo lebih sesuai dengan prinsip dan juga ideologinya yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonialis, partai politik yang radikal dan juga non-kooperatif. Kemudian ia juga mendirikan partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) sebagai respon dibubarkannya Partindo. Amir Syarifuddin dalam mendirikan Gerindo mendapatkan dukungan dari bekas tokoh-tokoh Partindo (Notodidjojo, 1980, hlm. 26).

Memasuki awal tahun 1940-an, Amir lalu berupaya membangun jaringan bawah tanahnya. Pertama ia mengumpulkan kawan-kawan dekatnya termasuk grup PKI Ilegal yang didirikan Musso tahun 1939 menyusul keputusan Komunis Internasional (Komintern) melalui Sekretaris Jenderal baru Gregorij Dimitrov dari Bulgaria untuk bekerjasama dengan golongan liberal demokrat untuk menentang fasisme (Gie, 2006, hlm. 20).

Ketika pendudukan Jepang, Amir Syarifuddin menyusun suatu organisasi bawah tanah yang diberi nama Liga Anti Fasis, hal tersebut menunjukkan kebencian Amir terhadap Fasis yang dijalankan Jepang. Kemudian pada masa

jepang berkuasa Amir Syarifuddin ditangkap oleh tentara Jepang, dan dipenjara hingga dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Namun, proses pelaksanaan hukuman mati itu berhasil dibatalkan berkat campur tangan Soekarno. *“Bebaskan dia (Amir) atau kalau tidak, jangan diharap lagi kerjasama dari saya”*, kata Soekarno kepada pemimpin Jepang (Poeze, 2011, hlm. 46) Akibatnya, atas campur tangan Soekarno-Hatta hukuman tersebut diubah dari hukuman mati menjadi seumur hidup.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, Amir Syarifuddin beserta Syahrir membentuk Partai berhaluan Sosialis. Kedua tokoh tersebut memiliki persamaan pandangan anti fasis, Amir dan kelompoknya dalam Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang terbentuk pada 1 November 1945 bergabung dengan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang dibentuk kelompok Syahrir pada 20 November 1945. Selain persamaan pandangan anti fasis, mereka juga mempunyai kesepakatan masa depan tentang kerangka revolusi nasional terlebih dahulu dengan perjuangan melawan Belanda kemudian menuju revolusi sosialis untuk Indonesia (Legge, 1993, hlm. 202).

Diawal kemerdekaan Indonesia, Amir mulai berperan penting terhadap jalannya pemerintahan Indonesia yang baru lepas dari kolonialisme, diawali dengan menjabat sebagai menteri penerangan pada masa kabinet Presidensial Soekarno, kemudian menteri penerangan dan menteri keamanan rakyat (pertahanan) di kabinet Sutan Syahrir I, kabinet Sutan Syahrir II dan kabinet Sutan Syahrir III, hingga kemudian menduduki sebagai perdana menteri (PM) menggantikan Sutan Syahrir ketika hasil perjanjian Linggarjati yang diwakili Syahrir dianggap merugikan Indonesia. Ketika Sutan Syahrir dianggap gagal dalam menjalankan perundingan yang mengakibatkan partai oposisi maupun pemerintah mulai tidak memberikan dukungan kepadanya. Dengan sikap dukungan yang tidak menentu dan kondisi pemerintahan negara yang sedang genting akhirnya Sutan Syahrir mengembalikan mandat kepada Presiden.

Pada tanggal 27 Juni 1947 Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden, sehingga berakhirilah pemerintahan kabinet Sutan Syahrir sebagai PM. Dalam suasana yang mendesak Presiden memerintah untuk segera membentuk kabinet baru, perintah Presiden antara lain berbunyi:

“Saya berpendapat, bahwa selekas mungkin harus dilantik kabinet yang bertanggungjawab. Berhubung hal itu saya minta saudara-saudara berempat membentuk kabinet yang bertanggung jawab itu dengan corak kabinet koalisi yang berdasarkan nasional. Saya minta saudara-saudara telah mengusulkan susunan kabinet kepada saya pada hari besok tanggal 1 Juli sebelum jam 18.00” (Nasution, 1978, hlm. 48).

Kemudian pada tanggal 3 Juli 1947 dilantikanlah kabinet yang baru. Amir Syarifuddin bertindak sebagai perdana menteri dengan merangkap sebagai menteri pertahanan. Kabinet Amir Syarifuddin ini merupakan kabinet koalisi nasional yang kuat karena semua partai dan golongan mendapat pembagian kursi.

Pada masa awal menjabat di pemerintahan, peran dan jasa Amir dalam kementerian penerangan sangat besar yakni meletakkan dasar-dasar organisasi dalam kementerian ini. Amir Syarifuddin berhasil menjadikan kementerian penerangan sebagai kementerian yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia terhadap nafsu Belanda untuk berkuasa kembali. Kemudian peran Amir Syarifuddin sebagai menteri keamanan rakyat yaitu meletakkan dasar, hakikat, dan sifat daripada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tentara yang diinginkan adalah suatu tentara yang militan, disiplin, dan memiliki semangat berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Amir Syarifuddin menginginkan agar di Indonesia hanya terdapat satu kesatuan tentara yakni TKR (Tentara Keamanan Rakyat) (Wellem, 2009, hlm. 219). Akan tetapi untuk pembentukan TKR, Amir Syarifuddin harus bertindak hati-hati karena situasi Republik Indonesia telah melahirkan banyak kesatuan perjuangan.

Pada saat Amir Syarifuddin menjadi perdana menteri, ia gigih mempertahankan hidup Republik Indonesia, dua perkara yang dipertahankannya adalah Belanda harus mengakui Indonesia secara *de facto* dan masalah keamanan dalam negeri adalah tanggungjawab negara Indonesia sendiri. Kabinet Amir Syarifuddin adalah kabinet politis. Beliau lebih mementingkan aspek politis daripada aspek pembangunan sosial ekonomi. Kabinetnya merupakan kabinet raksasa karena semua golongan dan partai politik duduk di dalamnya.

Bulan Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer I terhadap Indonesia, tujuan Belanda adalah penghancuran Indonesia. Peristiwa ini memaksa Amir Syarifuddin mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Dengan keyakinan

bahwa persetujuan Renville dapat menyelamatkan keadaan bangsa Indonesia dari Agresi Militer I Belanda. Tetapi hasil dari perundingan Renville dianggap merugikan bangsa Indonesia. Munculah berbagai reaksi publik. Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap kabinet Amir Syarifuddin, begitu juga kelompok Syahrir dari PSI. Krisis kabinet tidak dapat dihindarkan, pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin beserta kabinetnya mengembalikan mandat (Moedjanto, 1988, hlm. 23).

Perjanjian Renville yang dianggap merugikan berlanjut menjadi kecaman bagi Amir. Hal ini juga dialami Syahrir ketika menyetujui perjanjian Linggarjati hingga ia melepaskan jabatan sebagai perdana menteri. Tiga hari setelah melepaskan jabatan sebagai perdana menteri, Amir membentuk FDR yang merupakan gabungan partai dan kelompok berhaluan kiri. FDR didirikan pada 26 Januari 1948 – koalisi dari anggota-anggota PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Pesindo, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) (Nasution, 1977, hlm. 301). Amir mewakili Partai Sosialis yang kemudian menjadi berseberangan posisinya dengan Syahrir.

Dalam waktu singkat, FDR menjadi pihak oposisi bagi kabinet Hatta, FDR melayangkan berbagai kritik mengenai pelaksanaan perjanjian Renville. Amir bersama FDR menolak dilaksanakannya perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir sendiri. Atas tindakannya ini, ia banyak menerima kecaman termasuk dari parlemennya terdahulu, seperti dari PNI dan Masyumi. Adapun FDR juga menuntut agar Amir kembali menjadi menteri pertahanan (Toer, 2003, hlm. 11).

FDR menjadi gerakan yang jauh lebih agresif setelah 12 Agustus 1948. Hal ini dipicu oleh kedatangan Musso di Indonesia yang langsung memberikan kritik terhadap FDR (Poeze, 2011, hlm. 27). Perubahan yang pertama dilakukan Musso dengan CC PKI adalah menyatukan semua kelompok FDR dalam PKI (Toer, 2003, hlm. 542). Peleburan tersebut terjadi pada 29 Agustus 1948. Dengan peleburan ini, FDR berkembang menjadi gerakan yang dipengaruhi gaya Stalin. PKI semakin sering menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah, terutama mendorong demonstrasi-demonstrasi para buruh serta petani untuk

mengambil alih lahan milik tuan tanah. Tuntutan-tuntutan ini kemudian berakibat pada gangguan stabilitas pemerintahan (Ricklefs, 2008, hlm. 344).

Hatta, sebagai kepala pemerintahan, mencoba menghalau cepatnya pergerakan PKI. Langkah pertama yang ia lakukan untuk mempersempit dominasi komunis ialah dengan menyingkirkan Tentara pro-komunis yang berbuntut panjang menjadi peristiwa saling melucuti antara Tentara nasional (TNI) dan tentara PKI. Hal ini yang kemudian diyakini sebagai dasar munculnya Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun 1948, yang kemudian menyeret Amir pada peristiwa tersebut.

Dalam hal ini, kajian mengenai tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam pembentukan Republik Indonesia perlu dikaji terus menerus apalagi Republik Indonesia mempunyai banyak tokoh yang patut diteladani dan dipahami pemikirannya agar generasi penerus Bangsa Indonesia menyadari bahwa peranan dan perjuangan mewujudkan republik ini penuh dengan dinamika dan cenderung terjadi konflik diantara para tokoh. Namun, dinamika yang terjadi pada saat itu dilakukan dalam rangka memperjuangkan berdirinya negara Indonesia, maka perlu dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Salah seorang tokoh yang ditenggarai mengalami dinamika dan menimbulkan konflik dalam terbentuknya Republik ini adalah Amir Syarifuddin.

Mengenai periodisasi waktu dalam penelitian ini yaitu tahun 1945 – 1948. Dalam hal ini peneliti memilih untuk membatasi waktu tahun 1945 sebagai awal tahun dari penelitian. Sebabnya, karena peran Amir terhadap pemerintahan ini sangat berpengaruh ketika setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan menjabat di kabinet pemerintahan dengan menjabat beberapa posisi strategis. Kemudian untuk batas waktu diambil tahun 1948 di karenakan peranan Amir ditahun tersebut harus berhenti karena pilihan jalannya, yaitu dimulai ketika setelah tidak menjabat di pemerintahan, ia membentuk FDR yang kemudian melebur bersama PKI yang kemudian muncul peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, yang mengakibatkan terseretnya Amir pada peristiwa tersebut dan ditangkapnya Amir bersama kawan-kawannya dan berakhir dengan diberondong senjata oleh tentara Republiknya sendiri tanpa diadili terlebih dahulu.

Berdasarkan diskursus diatas, penulis merasa termotivasi untuk mengkaji dan meneliti sosok Amir Syarifuddin sebagai salah satu tokoh bangsa yang pernah memiliki peranan terhadap jalannya republik ini, terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dimana peranannya pada pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk dengan menjabat di Kabinet pemerintahan sebagai menteri pada kabinet presidensial Soekarno kemudian pada kabinet parlemen Sutan Syahrir I, II dan III, hingga menduduki posisi perdana menteri menggantikan Sutan Syahrir. Secara keseluruhan Amir menjabat di pemerintahan dari tahun 1945 – 1948, selama menjabat tersebut terdapat beberapa hal peristiwa dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan melalui penelitian berupa skripsi yang berjudul **“Amir Syarifuddin dalam bingkai sejarah revolusi Indonesia (1945 – 1948)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah. Maka, permasalahan utama yang akan dikaji adalah bagaimana Amir Syarifuddin pada masa Revolusi Indonesia tahun 1945 – 1948? Agar dapat terarah pada permasalahan pokok, maka penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Indonesia di awal kemerdekaan?
2. Bagaimana latar belakang sosial – politik Amir Syarifuddin?
3. Bagaimana peranan Amir Syarifuddin pada saat menjabat di Kabinet pemerintahan revolusi Indonesia tahun 1945 – 1948?
4. Bagaimana keterlibatan Amir Syarifuddin pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kondisi Indonesia di awal kemerdekaan.
2. Menjelaskan latar belakang sosial – politik Amir Syarifuddin.
3. Menganalisis peranan Amir Syarifuddin pada saat menjabat di Kabinet pemerintahan revolusi Indonesia tahun 1945 – 1948.

4. Menganalisis keterlibatan Amir Syarifuddin pada peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat secara umum dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan tentang salah satu sosok tokoh nasional bangsa Indonesia yaitu Amir Syarifuddin. Sedangkan manfaat khusus dari penelitian ini diantaranya adalah:

- 1). Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dengan jelas mengenai dinamika Amir Syarifuddin pada masa revolusi Indonesia. Hal ini tentunya menambah wawasan mengenai intelektualitas peneliti dan menunjang kompetensi peneliti sebagai seorang akademisi yang bergulat dalam bidang pengajaran sejarah.
- 2). Bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah, khususnya yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai bahan pembelajaran yang dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai sejarah revolusi Indonesia, khususnya dinamika sosok Amir yang memiliki catatan hitam dalam sejarah Indonesia, namun memiliki kontribusi yang penting terhadap bangsa Indonesia.
- 3). Bagi masyarakat yang peduli akan sejarah pada umumnya dan masyarakat sekitar yang peduli akan pendidikan khususnya, peneliti berharap skripsi ini bisa menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat terlebih mengenai Amir Syarifuddin dan sejarah revolusi Indonesia. Diharapkan dapat memberikan nalar kritis terhadap pembaca dalam memahami Amir Syarifuddin. Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian mengenai sosok Amir Syarifuddin sebagai tokoh pejuang nasional memiliki kontroversi dan stigma negatif yang lekat terhadap Amir Syarifuddin. Namun, dibalik stigma negatif yang tersimpan pada Amir terdapat jasa-jasa yang pernah diberikannya terhadap negeri ini yang harus diakui sebagai penghargaan terhadap sosok Amir Syarifuddin.

1.5 Struktur organisasi skripsi

Sistematika penulisan merupakan sebuah gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisan. Data atau hasil gambaran dalam skripsi yang berjudul “*Amir Syarifuddin dalam bingkai sejarah revolusi Indonesia (1945 – 1948)*” yang didapatkan melalui proses observasi, telaah pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara selanjutnya dikumpulkan kemudian diolah menjadi sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengambil kajian berjudul “Amir Syarifuddin dalam bingkai sejarah revolusi Indonesia (1945 – 1948)”. Selanjutnya dari judul yang dipilih dibuatnya rumusan masalah dan pembatasan masalah. Berikutnya penulis memuat tujuan penulisan yang merupakan jawaban dari rumusan yang telah ditetapkan. kemudian penulis memuat manfaat dari penulisan. Terakhir pada bagian bab ini terdapat penjelasan dari struktur organisasi yang memberikan gambaran dari setiap bab dari penelitian.

Bab II adalah bab yang membahas kajian pustaka dan teori. Pada bab ini dikemukakan tentang teori, pendapat serta analisis dari berbagai kepustakaan yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung memecahkan masalah yang dikaji, peneliti pun akan memberikan relevansi antara kajian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti lain.

Bab III adalah metodologi penelitian, pada bab ini mengungkap rangkaian kegiatan serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah pertama, persiapan penelitian yang terdiri dari pengajuan tema penelitian, penyusunan rancangan penelitian, konsultasi dan mengurus perizinan. Kedua adalah pelaksanaan penelitian serta melakukan kritik sumber baik internal maupun eksternal. Ketiga penafsiran atau interpretasi dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan terakhir melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan (historiografi).

Bab IV adalah pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan analisis deskriptif mengenai “Amir Syarifuddin dalam bingkai

sejarah revolusi Indonesia (1945 – 1948)”, pemaparan analisis merujuk pada rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

Bab V adalah simpulan, bab ini merupakan jawaban atas hasil permasalahan sesuai dengan interpretasi penulis. Dalam kesimpulannya, peneliti berusaha untuk memberikan pandangan peneliti terhadap Amir Syarifuddin pada masa revolusi Indonesia. Bab ini juga memuat saran dan rekomendasi dari peneliti kepada berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini.